

MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

¹Desire KaroKaro, ²Christin Destalia Kailuhu, ³Chalfinus Awek, ⁴Kisah Hartati Halawa,

⁵Jonathan Wantoro, ⁶Dwi Lestariningsih

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa

⁶Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdi Allah

email: ¹blissingkaban@gmail.com, ²destaliachristin@gmail.com,

³chalvinawek171192@gmail.com, ⁴kisahhartati@gmail.com, ⁵jojo.wantoro@gmail.com,

⁶298.dwi.lestari@gmail.com

Abstract

This article examines the cultural mandate of Genesis 1:28 through a theological-critical lens and explores its implications for the development of multicultural Christian Religious Education (CRE) in the context of Indonesia's religiously and culturally plural society. Employing a qualitative library-based approach, this study integrates theological-critical analysis of the biblical text with contemporary theological literature and scholarship on multicultural education. The findings indicate that anthropocentric interpretations of the cultural mandate tend to legitimize domination and exclusivist relations, both in human interaction with creation and in social relationships. In contrast, a relational-ethical interpretation reframes the cultural mandate as a moral vocation that calls for responsibility, justice, and inclusivity within diverse social contexts. The study further reveals that multicultural CRE has largely been approached normatively and pedagogically, with limited theological integration. As its primary contribution, this article proposes a conceptual framework for multicultural CRE curriculum development grounded in a theological-critical interpretation of the cultural mandate. This framework emphasizes reflective pedagogy and contextual sensitivity to cultural and religious pluralism in Indonesia, offering a constructive theological foundation for curriculum development in multicultural Christian education.

Keywords: cultural mandate; Genesis 1:28; Christian Religious Education; multicultural education; curriculum development

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis mandat budaya Kejadian 1:28 secara teologis-kritis dan mengkaji implikasinya bagi pengembangan Pendidikan Agama Kristen (PAK) multikultural dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis teologis-kritis dan konseptual terhadap teks Alkitab, literatur teologi kontemporer, serta kajian pendidikan multikultural. Hasil analisis menunjukkan bahwa penafsiran antroposentris terhadap mandat budaya berpotensi mengganggu relasi dominasi dan eksklusivisme, baik dalam relasi manusia dengan alam maupun antarmanusia. Sebaliknya, tafsir relasional-etis menempatkan mandat budaya sebagai panggilan tanggung jawab moral untuk membangun relasi yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat majemuk. Artikel ini menegaskan bahwa pendekatan PAK multikultural yang selama ini bersifat normatif dan pedagogis perlu direorientasi melalui integrasi refleksi teologis yang kritis. Sebagai kontribusi utama, artikel ini

Desire KaroKaro, dkk: MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

mkenawarkan kerangka konseptual pengembangan kurikulum PAK multikultural yang berakar pada tafsir teologis-kritis mandat budaya, dengan orientasi pedagogis reflektif dan kepekaan terhadap realitas pluralisme budaya dan agama di Indonesia.

Kata kunci: mandat budaya; Kejadian 1:28; Pendidikan Agama Kristen; pendidikan multikultural; pengembangan kurikulum

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang ditandai oleh keberagaman etnis, bahasa, budaya, dan agama yang hidup berdampingan dalam satu ruang sosial dan politik. Kondisi ini menghadirkan tantangan serius bagi dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Kristen (PAK), yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pewarisan iman, tetapi juga sebagai ruang pembentukan sikap sosial dan etis peserta didik dalam konteks masyarakat plural.¹ Pendidikan agama yang tidak peka terhadap realitas multikultural berpotensi memperkuat eksklusivisme dan segregasi sosial.

Pendidikan multikultural berkembang sebagai pendekatan pedagogis yang menekankan keadilan sosial, penghargaan terhadap perbedaan, dan pengakuan atas martabat setiap manusia tanpa memandang latar belakang budaya dan agama.² Dalam konteks Indonesia, urgensi pendidikan multikultural semakin meningkat seiring dengan menguatnya politik identitas dan meningkatnya ketegangan berbasis agama dan budaya. Yaya menegaskan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia harus berangkat dari kesadaran kebangsaan dan penghormatan terhadap pluralitas sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihindari.³

Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, integrasi pendidikan multikultural tidak dapat dilepaskan dari fondasi teologis yang menopangnya. Salah satu dasar teologis yang sering dirujuk adalah mandat budaya dalam Kejadian 1:28, yang memuat panggilan manusia untuk memenuhi, mengelola, dan mengembangkan bumi. Teks ini secara tradisional dipahami sebagai legitimasi peran manusia sebagai pengelola ciptaan Allah. Namun, penafsiran yang terlalu antroposentris terhadap mandat budaya telah menuai kritik karena berpotensi melanggar dominasi, eksploitasi, dan relasi kuasa yang timpang, baik terhadap alam maupun sesama manusia.⁴

Dalam perkembangan teologi kontemporer, mandat budaya dalam Kejadian 1:28 semakin dipahami secara etis dan relasional, bukan sebagai legitimasi dominasi manusia atas

¹ Yaya Jakaria and Pusat Penelitian Kebijakan, "PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR DENGAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU ANALYSIS OF APPROPRIATENESS AND SUITABILITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ' EDUCATIONAL BACKGROUND AND THEIR TAUGHT-SUBJECT-MATTER" (2014): 499–514.

² Human Development Report, "Human Development Report 2012/2013. Sustainable Nation," *Latvijas Univeritate* (2013).

³ Jakaria and Kebijakan, "PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR DENGAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU ANALYSIS OF APPROPRIATENESS AND SUITABILITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ' EDUCATIONAL BACKGROUND AND THEIR TAUGHT-SUBJECT-MATTER."

⁴ Agoha Emmanuel Chijioke and Festus Chukwunyere, "DOMINION OR DESTRUCTION ? A THEOLOGICAL AND HERMENEUTICAL CRITIQUE OF HUMAN AUTHORITY OVER NATURE IN GENESIS 1 : 26 – 28 : IMPLICATIONS FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY" (2025): 15–32.

Desire KaroKaro, dkk: MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

ciptaan. Kajian eksegetis mutakhir menegaskan bahwa istilah *radah* dan *kabash* dalam Kejadian 1:28 perlu dibaca dalam kerangka teologi penciptaan yang menekankan tanggung jawab moral, pemeliharaan, dan partisipasi manusia dalam karya Allah, bukan sebagai pembenaran kuasa eksploitatif terhadap alam dan sesama manusia.⁵ Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai bagian dari komunitas ciptaan yang saling bergantung, sehingga mandat budaya memiliki implikasi etis dan sosial yang luas.

Pemahaman relasional ini membuka ruang bagi refleksi mandat budaya sebagai dasar teologis bagi relasi manusia yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Teologi penciptaan kontemporer menekankan bahwa manusia dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah dalam relasi yang menjaga kehidupan, keadilan, dan keberlanjutan, baik dalam relasi ekologis maupun sosial.⁶

Meskipun pendekatan etis terhadap mandat budaya semakin berkembang, kajian teologi dan pendidikan Kristen masih cenderung berfokus pada aspek etika lingkungan atau spiritualitas kerja, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan isu keadilan sosial, pluralitas budaya, dan pendidikan multikultural.⁷ Analisis terhadap literatur ekoteologi menunjukkan bahwa mandat budaya sering dipersempit pada relasi manusia–alam, sementara dimensi relasi antarmanusia dalam masyarakat plural belum digarap secara memadai.⁸ Dalam ranah pendidikan, hal ini berdampak pada praktik Pendidikan Agama Kristen yang lebih menekankan nilai toleransi secara normatif, tanpa kerangka teologis yang reflektif dan kritis.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan kerangka konseptual pengembangan kurikulum PAK multikultural yang berakar pada tafsir teologis-kritis mandat budaya Kejadian 1:28, sekaligus peka terhadap konteks pluralisme budaya dan agama di Indonesia. Berbagai penelitian teologis kontemporer telah membahas mandat budaya dalam Kejadian 1:28 sebagai dasar teologis relasi manusia dengan ciptaan dan dunia sosial, dengan menekankan tanggung jawab manusia sebagai pengelola ciptaan Allah dalam kerangka etika relasional, bukan dominasi eksploitatif.⁹ Di sisi lain, pendidikan multikultural dalam Pendidikan Agama Kristen telah dikaji terutama dalam kerangka pedagogi inklusif, pembentukan sikap toleransi, dan pengelolaan keberagaman dalam konteks masyarakat plural.¹⁰ Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih berjalan secara paralel dan belum terintegrasi secara sistematis dalam suatu kerangka pengembangan kurikulum PAK yang secara eksplisit berakar pada refleksi teologis atas mandat budaya.

Dengan demikian, celah penelitian terletak pada belum adanya model konseptual pengembangan kurikulum PAK multikultural yang secara eksplisit berangkat dari tafsir teologis-kritis mandat budaya dan dikontekstualisasikan dalam realitas pluralisme Indonesia. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi teologis–kurikuler, yakni merumuskan mandat

⁵ Predrag Živkovi and Vladimir Bakra, “Adventists in Montenegro — From the Atheistic Psychosis of Socialism to the Post-Socialist Individuation of Adventism” (2020).

⁶ Johann Beukes, “Neoplatonism in the Cologne Tradition of the Later Middle Ages : Berthold of Moosburg (ca . 1300 – 1361) as Case Study” (2020): 1–15.

⁷ Roidja Hapsarini and Yendi Wati Pige, “Pemahaman Peserta Didik Tentang Mandat Budaya Dalam Kejadian 1 : 28 Terhadap Kepedulian Lingkungan” 1 (2021): 39–49.

⁸ Roedy Silitonga and Yosia Belo, “Imago Dei as the Foundation of Christian Ethics in Addressing the Ecological Crisis in Indonesia,” *Verbum Et Ecclesia* (2025): 1–6.

⁹ Hilton R Scott, “Worship in a Post-Lockdown Context : A Ritual-Liturgical Perspective” (n.d.): 1–8.

¹⁰ Małgorzata Ste, “Education . Towards Personal Growth and Positive Mental” (2021).

Desire KaroKaro, dkk: MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

budaya bukan hanya sebagai dasar etika umum, tetapi sebagai fondasi konseptual bagi pengembangan kurikulum PAK multikultural yang reflektif, kritis, dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana mandat budaya dalam Kejadian 1:28 dapat ditafsirkan secara teologis-kritis dalam konteks pluralisme budaya dan agama; (2) bagaimana prinsip-prinsip pendidikan multikultural dapat diintegrasikan dengan mandat budaya dalam Pendidikan Agama Kristen; dan (3) bagaimana kerangka konseptual pengembangan kurikulum PAK multikultural dapat dirumuskan berdasarkan integrasi teologis tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mandat budaya Kejadian 1:28 secara teologis-kritis sebagai dasar etis dan pedagogis bagi PAK, mengkaji integrasi pendidikan multikultural dalam Pendidikan Agama Kristen di Indonesia, serta merumuskan kerangka konseptual pengembangan kurikulum PAK multikultural yang berlandaskan refleksi teologis kontekstual.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada analisis teologis-kritis dan pengembangan kerangka konseptual kurikulum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menafsirkan mandat budaya Kejadian 1:28 secara reflektif serta mengintegrasikannya dengan prinsip pendidikan multikultural dalam Pendidikan Agama Kristen, bukan untuk menguji hipotesis empiris. Penelitian dilakukan melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian teologis-eksegetis, analisis pedagogis pendidikan multikultural, dan teori pengembangan kurikulum, mengingat isu mandat budaya dan multikulturalisme berada pada irisan antara teologi, pendidikan, dan konteks sosial.¹¹

Sumber data berupa literatur primer dan sekunder yang dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitas akademik. Analisis data dilakukan melalui sintesis konseptual, yaitu mengintegrasikan hasil analisis teologis mandat budaya dengan prinsip pendidikan multikultural untuk merumuskan kerangka konseptual pengembangan kurikulum PAK multikultural. Pengembangan kurikulum dipahami sebagai konstruksi konseptual yang mencakup arah teologis dan pedagogis, bukan sekadar desain teknis pembelajaran.¹² Keabsahan analisis dijaga melalui koherensi argumentatif dan konsistensi antara rumusan masalah, analisis, dan kerangka konseptual yang dihasilkan, sesuai dengan prinsip validitas penelitian kualitatif konseptual.¹³

III. HASIL PEMBAHASAN

Mandat Budaya Kejadian 1:28 dalam Perspektif Teologis-Kritis

Kejadian 1:28 merupakan salah satu teks kunci dalam teologi penciptaan yang secara historis memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman Kristen tentang relasi

¹¹ Cheryl N. Poth. Creswell, John W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th Ed. Thousand Oaks, (CA: : SAGE Publications, 2018).

¹² F. P. Ornstein, A. C., & Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*, 7th ed. (Pearson, 2018), <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/curriculum-foundations-principles-and-issues/P200000006450>.

¹³ Richard R. Osmer, *Practical Theology: An Introduction*. Eerdmans Publishing (Eerdmans Publishing, 2008).

Desire KaroKaro, dkk: MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

manusia dengan ciptaan dan dunia sosial. Ayat ini memuat apa yang dalam tradisi teologi Kristen dikenal sebagai *mandat budaya*, yaitu panggilan Allah kepada manusia untuk “beranak cucu dan bertambah banyak; memenuhi bumi dan menaklukkannya; berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.” Dalam sejarah penafsiran, teks ini sering dipahami sebagai legitimasi teologis bagi peran manusia sebagai pengelola dan penguasa ciptaan, dengan penekanan pada kapasitas rasional dan moral manusia sebagai *imago Dei*.¹⁴

Namun demikian, pendekatan teologis-kritis terhadap Kejadian 1:28 menunjukkan bahwa tafsir tradisional yang menekankan dominasi manusia atas ciptaan tidaklah netral secara teologis maupun etis. Sejumlah teolog kontemporer menilai bahwa pembacaan mandat budaya secara antroposentris telah berkontribusi pada membenaran eksploitasi alam, relasi kuasa yang timpang, serta praktik sosial yang meneguhkan hierarki dan dominasi atas pihak lain, baik dalam relasi manusia dengan alam maupun antarmanusia.¹⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap Kejadian 1:28 tidak dapat berhenti pada penegasan fungsi manusia sebagai penguasa, melainkan perlu ditempatkan dalam kerangka teologi penciptaan yang lebih luas dan relasional.

Kajian eksegetis terhadap istilah kunci *radah* (רָדָה, “berkuasa”) dan *kabash* (כָּבַשׁ, “menaklukkan”) menjadi titik penting dalam penafsiran mandat budaya. Dalam banyak tafsir klasik, kedua istilah ini dipahami dalam kerangka hierarkis yang menempatkan manusia sebagai subjek dominan atas ciptaan lain. Akan tetapi, studi leksikal dan kontekstual menunjukkan bahwa makna kedua istilah tersebut tidak bersifat tunggal dan harus dibaca dalam konteks keseluruhan narasi penciptaan Kejadian 1–2, yang ditandai oleh deklarasi Allah bahwa ciptaan-Nya “sungguh amat baik” (Kej. 1:31). Middleton menegaskan bahwa *radah* dan *kabash* tidak boleh dilepaskan dari karakter Allah sebagai Pencipta yang memelihara dan menopang kehidupan, sehingga kuasa manusia bersifat delegatif dan bertanggung jawab, bukan absolut.¹⁶

Selain relasi manusia dengan alam, pendekatan teologis-kritis terhadap Kejadian 1:28 juga membuka dimensi sosial mandat budaya yang sering terabaikan. Narasi penciptaan tidak hanya berbicara tentang relasi ekologis tetapi juga tentang relasi antarmanusia sebagai sesama ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Nya, yang selaras dengan pembahasan teologis bahwa mandat budaya memaksudkan tanggung jawab moral manusia dalam konteks komunitas dan etika sosial. Studi teologi yang terkait dengan penciptaan dan etika Kristen menekankan bahwa manusia tidak hanya diberi kuasa atas ciptaan lain tetapi juga dipanggil untuk hidup dalam relasi yang mencerminkan karakter Allah seperti keadilan, penghormatan martabat, dan tanggung jawab sosial (contoh pendekatan teologi ekologis dan etis terhadap teks-teks Alkitab).¹⁷

¹⁴ By J Richard Middleton, “The Liberating Image ? Interpreting the Imago Dei in Context” 1 (1994): 8–25.

¹⁵ Ernst M Conradie, “THE FOUR TASKS OF CHRISTIAN ECOTHEOLOGY : REVISITING THE CURRENT DEBATE” 119, no. 1967 (2021): 1–13.

¹⁶ Middleton, “The Liberating Image ? Interpreting the Imago Dei in Context.”

¹⁷ and Christopher Southgate David G. Horrell, Cheryl Hunt, “Appeals to the Bible in Ecotheology and Environmental Ethics: A Typology of Hermeneutical Stances,” *Sage Journal: Studies in Christian Ethics* 21, no. 2 (2008).

Desire KaroKaro, dkk: MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

Dalam perspektif teologis-kritis, penafsiran Kejadian 1:28 yang menekankan dominasi manusia atas ciptaan perlu ditantang oleh pembacaan relasional yang menempatkan manusia sebagai bagian dari komunitas ciptaan yang saling bergantung, bukan sebagai penguasa absolut. Pendekatan teologi hermeneutika ekologis menunjukkan pentingnya membaca Alkitab dengan kesadaran bahwa teks-teks ini mempengaruhi etika kita terhadap ciptaan dan sesama, sehingga kuasa yang diberikan kepada manusia dipahami secara etis, dalam tanggung jawab terhadap Allah dan komunitas ciptaan.¹⁸

Implikasi penting dari pendekatan ini adalah bahwa mandat budaya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan alam tetapi juga dengan pembentukan struktur sosial dan budaya yang adil. Dalam konteks masyarakat plural, mandat budaya dapat dipahami sebagai panggilan untuk membangun relasi sosial yang menghormati perbedaan, menolak dominasi, dan mengupayakan keadilan bagi semua kajian teologi interkultural dan hermeneutik kontekstual menegaskan relevansi teologi bagi dialog multikultural dan relasi antar-agama.¹⁹

Dengan demikian, analisis teologis-kritis terhadap Kejadian 1:28 menunjukkan bahwa mandat budaya tidak dapat direduksi menjadi legitimasi kuasa manusia, melainkan harus dipahami sebagai panggilan etis dan relasional yang menuntut tanggung jawab dalam relasi manusia dengan Allah, sesama, dan ciptaan secara keseluruhan. Pemahaman ini menjadi fondasi teologis yang signifikan bagi refleksi tentang Pendidikan Agama Kristen multikultural, karena menempatkan relasi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat sebagai inti panggilan iman Kristen dalam konteks masyarakat plural.²⁰

Mandat Budaya dan Relasi Multikultural dalam Masyarakat Plural

Pemahaman mandat budaya Kejadian 1:28 dalam perspektif teologis-kritis membuka ruang refleksi yang lebih luas mengenai implikasi sosial mandat tersebut, khususnya dalam relasi antarmanusia di tengah masyarakat plural. Jika mandat budaya tidak lagi dipahami sebagai legitimasi dominasi tetapi sebagai panggilan etis dan relasional, maka relasi sosial manusia — termasuk relasi lintas budaya dan agama — menjadi bagian integral dari tanggung jawab teologis manusia sebagai gambar Allah. Dalam kerangka masyarakat multikultural, perjumpaan dengan perbedaan bukan sekadar fakta sosial tetapi realitas kultural yang tidak terhindarkan. Pluralisme agama, sebagaimana kondisi nyata masyarakat Indonesia yang majemuk, dapat berpotensi menjadi sumber harmonisasi maupun konflik bila tidak dikelola secara etis dan reflektif dalam kehidupan bersama. Studi sosiologis menunjukkan bahwa pluralisme agama bukan hanya tentang keberagaman semata tetapi juga dinamika hubungan sosial dan budaya yang menuntut keterbukaan terhadap dialog dan saling menghormati perbedaan dan pengalaman iman lain.²¹

Dalam masyarakat plural, relasi multikultural tidak hanya ditandai oleh keberagaman identitas tetapi juga oleh dinamika kuasa, sejarah konflik, dan ketegangan antar kelompok. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian sosial, pluralisme agama dapat menjadi sumber

¹⁸ David G. Horrell, Cheryl Hunt, “Appeals to the Bible in Ecotheology and Environmental Ethics: A Typology of Hermeneutical Stances.”

¹⁹ Henning Wrogemann, “Intercultural Theology as In-Between Theology” (2021).

²⁰ Wrogemann, “Intercultural Theology as In-Between Theology.”

²¹ Wilson Afandi Siahaan and Ponten Naibaho, “Beragama Menciptakan Harmoni Sosial : Refleksi Teologis Atas Tanggung Jawab Iman Di Tengah Keberagaman,” no. 1 (2026): 1–12.

konflik apabila dipahami secara sempit tanpa refleksi dialogis terhadap realitas perbedaan.²² Artinya, refleksi teologis tentang mandat budaya tidak dapat semata-mata mengidealkan koeksistensi tanpa memahami dinamika historis dan sosial yang menyertai keberagaman tersebut.

Pendekatan teologis-kritis terhadap mandat budaya menolak asumsi bahwa relasi antar manusia dalam masyarakat plural otomatis bersifat harmonis. Sebaliknya, mandat budaya justru memanggil manusia untuk secara aktif mengelola relasi sosial yang kompleks dengan cara yang mencerminkan keadilan dan tanggung jawab moral. Teologi kontemporer plural menekankan bahwa iman Kristen harus mampu berkontribusi pada kehidupan bersama yang adil dan inklusif tanpa menghilangkan identitas teologisnya secara normatif. Dalam dialog antara iman dan pluralitas budaya serta agama, posisi keagamaan yang bersifat eksklusif berpotensi menimbulkan ketegangan ketika berhadapan dengan realitas pluralisme tersebut — sehingga diperlukan pengelolaan klaim iman secara etis agar tidak berubah menjadi bentuk dominasi atas yang lain.²³

Konsep *intercultural theology* (teologi antarpihak) juga relevan dalam konteks ini. Teologi antarpihak, menurut Henning Wrogemann, menekankan bahwa kerangka relasi lintas budaya dan agama harus dianalisis dalam kerangka *in-between*, yaitu ruang pertemuan di mana berbagai identitas budaya dan maupun agama berinteraksi dan saling mengkontekstualisasikan. Teologi semacam ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga normatif, menantang pembacaan yang statis terhadap dogma dan mendorong dialog yang memperhitungkan faktor budaya, kuasa, dan konektivitas sosial.²⁴

Dalam masyarakat multikultural, relasi antarmanusia sering dibingkai oleh klaim identitas yang bersifat partikular, termasuk klaim keagamaan yang normatif dan eksklusif. Relasi semacam ini berpotensi menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola secara reflektif dan etis. Konsep pluralisme tidak hanya dipahami sebagai toleransi, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap keberagaman yang membutuhkan pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap martabat sesama. Pandangan ini menunjukkan pentingnya memperluas pemahaman mandat budaya agar mencakup hubungan yang adil dan inklusif antara individu dan kelompok dalam masyarakat majemuk yang dinamis.²⁵

Dalam konteks Indonesia, karakter masyarakat plural tidak sekedar fenomena teologis tetapi juga historis dan sosial. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai budaya, etnis, dan agama yang hidup berdampingan — suatu kondisi yang menurut studi pluralisme agama memerlukan pemahaman yang lebih dari sekedar menerima perbedaan,

²² Siahaan and Naibaho, “Beragama Menciptakan Harmoni Sosial : Refleksi Teologis Atas Tanggung Jawab Iman Di Tengah Keberagaman.”

²³ Bert Roebben and Klaus von Stosch, “Religious Education and Comparative Theology: Creating Common Ground for Intercultural Encounters,” *Religions* 13, no. 11 (2022): 1014, <https://www.mdpi.com/2077-1444/13/11/1014/pdf?version=1666770007>.

²⁴ S Cholil, “Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy,” *Interreligious studies and intercultural theology* 6, no. 2 (2023): 196–204, [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57618/1/Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57618/1/Freedom%20of%20Religion%20amid%20Polarization%20and%20Religious%20Moderation%20Policy.pdf).

²⁵ Siahaan and Naibaho, “Beragama Menciptakan Harmoni Sosial : Refleksi Teologis Atas Tanggung Jawab Iman Di Tengah Keberagaman.”

tetapi juga memahami akar konflik, ketidaksetaraan struktural, serta dinamika kuasa sosial yang mempengaruhi hubungan antar kelompok.²⁶

Refleksi teologis mengenai mandat budaya dalam masyarakat plural perlu mempertimbangkan bahwa keberagaman agama dan budaya merupakan bukan hanya fenomena sosial tetapi pengalaman hidup bersama yang memerlukan pendekatan dialogis dan etis secara aktif. Pendidikan agama, sebagai arena pembentukan nilai dan etika, memainkan peran penting dalam mempersiapkan individu untuk masuk ke dalam relasi multikultural yang adil dan bertanggung jawab. Pendidikan semacam ini tidak boleh terjebak dalam moralistik semata — yakni sekadar menegaskan nilai kasih dan toleransi tanpa mengkaji secara kritis bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam relasi sosial yang konkret dan sarat relasi kuasa.²⁷

Dengan demikian, mandat budaya Kejadian 1:28 dalam konteks masyarakat plural tidak dapat direduksi menjadi seruan etika yang abstrak tetapi merupakan landasan teologis yang memanggil manusia untuk berkontribusi secara aktif dalam membangun kehidupan bersama yang adil, inklusif, dan saling menghormati. Hal ini relevan bagi pendidikan agama Kristen multikultural yang tidak sekadar mengajarkan nilai toleransi formal tetapi memfasilitasi pemahaman relasi sosial yang kritis dan reflektif dalam kehidupan nyata masyarakat plural.²⁸

Pendidikan Agama Kristen Multikultural dalam Tinjauan Teologis-Kritis

Pendidikan Agama Kristen (PAK) multikultural berkembang sebagai respons terhadap realitas masyarakat yang semakin majemuk secara budaya, etnis, dan agama. Dalam kajian pendidikan kontemporer, multikulturalisme dipahami sebagai pendekatan pedagogis yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan, toleransi, dan dialog antarbudaya sebagai bagian integral dari pembentukan karakter peserta didik. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa pendidikan agama tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kultural tempat peserta didik hidup dan berinteraksi. Sebagaimana ditegaskan oleh James A. Banks, pendidikan multikultural menuntut kurikulum yang inklusif dan transformatif untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan mempromosikan partisipasi yang setara bagi seluruh kelompok sosial (*Transforming Multicultural Education Policy and Practice*).²⁹

Namun demikian, dalam praktik dan literatur PAK, integrasi pendidikan multikultural sering kali masih bersifat normatif dan deskriptif, dengan penekanan pada nilai-nilai universal tanpa refleksi teologis yang memadai terhadap implikasi iman Kristen dalam masyarakat plural. Kajian PAK menunjukkan bahwa banyak pendekatan pendidikan agama masih memosisikan multikulturalisme sebagai tambahan moralistik di luar kerangka teologis utama. Akibatnya, nilai-nilai seperti toleransi dan saling menghormati sering dianggap

²⁶ Kerukunan Hidup Beragama, “Volume 26 Nomor 2 September 2015 431” 26, no. September (2015): 431–443.

²⁷ Yonatan Alex Arifianto et al., “SOSIOLOGI PLURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UPAYA MEMBANGUN KESATUAN BANGSA,” *Jurnal Shanan* 2, no. 2 (2021): 95–110.

²⁸ Arifianto et al., “SOSIOLOGI PLURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UPAYA MEMBANGUN KESATUAN BANGSA.”

²⁹ Margaret Smith Crocco James A. Banks, *Transforming Multicultural Education Policy and Practice* (Colombia: Teachers College Press, 2021).

identik dengan ajaran Kristen tanpa pembacaan teologis yang kontekstual dan kritis terhadap relasi kuasa dan identitas sosial (*Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik*).³⁰

Pendekatan semacam ini menjadi problematis ketika pendidikan agama dihadapkan pada realitas pluralisme yang sarat dengan ketegangan sosial, konflik identitas, dan kompetisi simbolik. Pendidikan agama yang hanya menekankan toleransi, tanpa refleksi terhadap struktur sosial dan posisi teologis iman, berisiko memperkuat eksklusivisme terselubung. Dalam konteks inilah Thomas Groome menegaskan bahwa pendidikan iman yang tidak reflektif dapat jatuh pada moralistik dangkal yang gagal menjawab kompleksitas sosial-teologis masyarakat majemuk, serta menutup ruang dialog kritis dengan yang berbeda.³¹

Dari perspektif teologis-kritis, PAK multikultural perlu dipahami bukan sekadar sebagai instrumen harmoni sosial, melainkan sebagai praksis teologis yang bergumul dengan ketegangan antara partikularitas iman dan pluralitas konteks. Teologi Kristen menegaskan pengakuan terhadap Allah Tritunggal dan Kristus sebagai pusat iman yang tidak dapat direduksi menjadi nilai moral universal. Tantangan bagi pendidikan Kristen adalah bagaimana mempertahankan partikularitas iman tanpa menjadikannya dasar dominasi atau penyingkiran terhadap yang lain. Dalam hal ini, Miroslav Volf melalui gagasannya tentang *exclusion and embrace* menekankan pentingnya “identitas yang terbuka” iman yang teguh namun bersedia berdialog dan menghargai keberadaan orang lain sebagai sesama ciptaan Allah.³²

Lebih jauh, pendekatan teologis-kritis terhadap PAK multikultural juga menuntut evaluasi terhadap asumsi pedagogis yang digunakan. Banyak pendekatan multikultural mengasumsikan bahwa pengetahuan tentang budaya lain otomatis menghasilkan sikap toleran, padahal studi pendidikan kritis menunjukkan bahwa *awareness* tanpa refleksi atas kuasa dan posisi diri tidak cukup untuk membangun relasi yang adil.³³ Oleh karena itu, pendidikan multikultural dalam PAK perlu bergerak dari pendekatan informatif menuju pendekatan reflektif dan transformatif yang mengajak peserta didik mengkritisi cara iman mereka beroperasi dalam relasi sosial konkret. Pendekatan semacam ini selaras dengan semangat PAK kontemporer di Indonesia yang menekankan pembentukan karakter melalui relasi lintas budaya dan dialog antaragama.³⁴

Dalam konteks Indonesia, tantangan PAK multikultural menjadi semakin kompleks karena agama berfungsi bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai identitas sosial dan politik. Ketegangan antaragama di Indonesia kerap berakar pada politisasi identitas dan praktik eksklusivisme di ruang publik, bukan semata-mata pada perbedaan doktrinal. Oleh sebab itu, pendidikan agama memiliki peran strategis namun juga rentan: ia

³⁰ Wita Marheni et al., “Pendidikan Agama Kristen : Menyemai Kasih Dan Kerukunan Dalam Komunitas Yang Multikultural,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 3, no. 1 (2025): 17–23.

³¹ Daniel Nuhamara, “Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen,” *Jurnal Jaffray* 16, no. 1 (2018): 93.

³² Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. (Nashville: Abingdon Press, 2019).

³³ James A. Banks, *Transforming Multicultural Education Policy and Practice*.

³⁴ Agusmawarni Harefa Rezeki Putra Gulo, Erwin Zai, “Pendidikan Agama Kristen Dalam Masyarakat Majemuk: Mencerminkan Hidup Humanis Di Tengah-Tengah Pluralisme,” *ELEOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2023): 81–90.

Desire KaroKaro, dkk: MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

bisa menjadi wahana rekonsiliasi lintas-iman atau justru alat reproduksi intoleransi apabila tidak disusun secara kritis.

Pendekatan teologis-kritis terhadap PAK multikultural juga menuntut keterlibatan serius dengan teks-teks teologis Alkitab, terutama mandat budaya dalam Kejadian 1:28. J. Richard Middleton menegaskan bahwa manusia, sebagai gambar Allah (*imago Dei*), dipanggil untuk berpartisipasi dalam karya Allah yang memelihara kehidupan, bukan mengeksploitasi atau mendominasi ciptaan. Kuasa manusia bersifat *delegatif* dan *relasional*, sehingga tanggung jawab etis terhadap sesama dan lingkungan menjadi bagian dari spiritualitas pendidikan Kristen (*The Liberating Image*).³⁵ Dengan demikian, refleksi mandat budaya memberi dasar teologis bahwa relasi dengan yang berbeda — baik agama maupun budaya — adalah wujud tanggung jawab iman, bukan ancaman terhadap kemurnian doktrin.

Selain itu, pendekatan teologis-kritis juga mengharuskan evaluasi terhadap peran kurikulum dalam membentuk pandangan peserta didik. Allan Ornstein dan Francis Hunkins menegaskan bahwa kurikulum tidak netral secara ideologis; ia selalu merefleksikan nilai, keyakinan, dan asumsi tertentu tentang dunia dan masyarakat.³⁶ Maka, kurikulum PAK yang gagal mengakomodasi realitas plural berpotensi melanggengkan pandangan sempit terhadap keimanan dan budaya lain. Sebaliknya, kurikulum yang sadar teologis dan sosial akan mengarahkan peserta didik menuju kesadaran reflektif terhadap keberagaman.

Pendekatan kritis terhadap PAK multikultural juga mendorong dialog lintas disiplin, seperti sosiologi agama, studi budaya, dan teologi publik. Duncan Forrester menekankan bahwa pendidikan teologis yang relevan di ruang publik harus mampu berinteraksi dengan realitas sosial dan politik masyarakat plural, mengembangkan kesadaran akan peran iman dalam kehidupan publik.³⁷ Dengan demikian, PAK multikultural tidak boleh dibatasi pada ruang kelas atau gereja semata, tetapi harus menjadi bagian dari praksis iman publik yang membentuk etika sosial dan relasi lintas komunitas.

Akhirnya, tinjauan teologis-kritis terhadap PAK multikultural menunjukkan bahwa pendekatan moralistik semata tidak cukup untuk menjawab tantangan pluralisme kontemporer. Pendidikan agama Kristen perlu direorientasi sebagai praksis teologis yang reflektif, dialogis, dan sadar akan relasi kuasa serta identitas sosial. Pendekatan ini tidak meniadakan partikularitas iman Kristen, tetapi menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab relasional yang berakar pada teologi penciptaan dan mandat budaya. Refleksi tersebut menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kurikulum PAK multikultural yang bukan hanya mengajarkan toleransi, tetapi menumbuhkan kesadaran kritis untuk hidup bersama secara adil dan bermartabat di tengah masyarakat yang plural.

Kerangka Konseptual Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen Multikultural

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Kristen (PAK) multikultural menuntut pendekatan yang melampaui penyusunan tujuan instruksional dan strategi pembelajaran

³⁵ Middleton, “The Liberating Image ? Interpreting the Imago Dei in Context.”

³⁶ F. P. Ornstein, A. C., & Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*, (8th ed.). (Pearson, 2018).

³⁷ D. B. Forrester, *Public Theology for the 21st Century*. (Routledge., 2011).

Desire KaroKaro, dkk: MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

semata. Kurikulum perlu dipahami sebagai konstruksi konseptual yang merefleksikan pandangan teologis, antropologis, dan sosial tertentu tentang manusia, dunia, dan iman. Dalam kajian kurikulum modern, kurikulum tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu membawa asumsi ideologis dan nilai normatif yang membentuk cara peserta didik memahami realitas dan posisi dirinya di dalamnya. Hal ini ditegaskan oleh Ornstein & Hunkins bahwa setiap kurikulum merupakan hasil konstruksi sosial dan ideologis yang merefleksikan nilai tertentu yang dihidupi oleh masyarakat pendidikan, bukan sekadar alat teknis pembelajaran.³⁸ Dengan demikian, pengembangan kurikulum PAK multikultural harus berangkat dari refleksi teologis yang eksplisit dan kritis, khususnya terkait dengan mandat budaya Kejadian 1:28 sebagaimana telah dianalisis sebelumnya.

Dalam perspektif teologis-kritis, mandat budaya menyediakan fondasi konseptual yang kuat bagi pengembangan kurikulum PAK multikultural karena menempatkan relasi sebagai inti panggilan manusia. Mandat budaya tidak hanya berbicara tentang pengelolaan alam, tetapi juga tentang pembentukan relasi sosial yang adil dan bertanggung jawab dalam komunitas manusia yang majemuk. Menurut Middleton, pemahaman mandat budaya menegaskan bahwa kuasa manusia bersifat delegatif dan relasional, bukan dominatif; oleh karena itu, pendidikan Kristen harus membentuk kesadaran etis dan sosial peserta didik dalam menghadapi pluralitas budaya dan agama.³⁹ Pemikiran ini menunjukkan bahwa kerangka konseptual kurikulum PAK multikultural mesti berakar pada teologi penciptaan yang relasional, bukan pada pendekatan antroposentris atau eksklusivistik.

Secara konseptual, kerangka kurikulum PAK multikultural yang berlandaskan mandat budaya dapat dirumuskan melalui tiga dimensi utama: fondasi teologis, orientasi pedagogis, dan arah kurikuler. Dimensi fondasi teologis menempatkan mandat budaya sebagai kerangka normatif yang menegaskan martabat setiap manusia sebagai gambar Allah serta tanggung jawab etis dalam relasi dengan sesama dan ciptaan. Fondasi ini menolak pemahaman iman Kristen yang bersifat dominatif dan menekankan karakter Allah yang memelihara, adil, dan relasional sebagaimana ditegaskan oleh Wright.⁴⁰ Dalam kerangka ini, pluralitas tidak dipandang sebagai ancaman terhadap iman, melainkan sebagai konteks konkret tempat iman diwujudkan secara bertanggung jawab.

Dimensi orientasi pedagogis berkaitan dengan cara kurikulum membentuk proses belajar-mengajar. Pendidikan multikultural dalam PAK tidak dapat direduksi menjadi pengenalan fakta budaya atau penanaman sikap toleransi normatif semata. Pendekatan pedagogis yang relevan adalah pendekatan reflektif-kritis yang mengajak peserta didik untuk merefleksikan posisi iman mereka sendiri dalam relasi dengan yang berbeda serta mengkritisi struktur sosial dan budaya yang membentuk relasi tersebut. Banks menegaskan bahwa pendidikan multikultural harus berfungsi untuk membangun kesadaran kritis (*critical consciousness*) dan partisipasi sosial yang inklusif, bukan hanya menyampaikan informasi

³⁸ Ornstein, A. C., & Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*.

³⁹ Chijioke and Chukwunyere, "DOMINION OR DESTRUCTION? A THEOLOGICAL AND HERMENEUTICAL CRITIQUE OF HUMAN AUTHORITY OVER NATURE IN GENESIS 1 : 26 – 28 : IMPLICATIONS FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY."

⁴⁰ C. J. H. Wright, *The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative*. (IVP Academic., 2006).

tentang keberagaman.⁴¹ Pandangan ini diperkuat oleh Turnip yang menemukan bahwa penerapan pembelajaran multikultural dalam pendidikan agama Kristen di Indonesia terbukti efektif dalam menumbuhkan toleransi religius yang berbasis refleksi iman, bukan sekadar sikap formal terhadap perbedaan.⁴²

Dimensi arah kurikuler menegaskan bahwa kurikulum PAK multikultural harus dirancang sebagai ruang dialog antara iman Kristen dan realitas sosial yang plural. Kurikulum bukan hanya mengatur konten pembelajaran, tetapi juga membentuk horizon makna peserta didik tentang dunia dan sesama. Kurikulum konseptual yang kuat harus menjawab pertanyaan mendasar tentang “pengetahuan apa yang bernilai dan untuk tujuan apa pendidikan diselenggarakan. Dalam konteks PAK multikultural, arah kurikuler diarahkan pada pembentukan peserta didik yang mampu menghidupi iman Kristen secara reflektif, dialogis, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat majemuk. Penelitian Mutiara et al. menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan multikultural di sekolah dasar Kristen berkontribusi signifikan dalam meningkatkan toleransi beragama dan penerimaan keberagaman antar siswa.⁴³

Kerangka konseptual ini juga menuntut kritik terhadap kecenderungan kurikulum PAK yang bersifat partikularistik dan ahistoris. Kurikulum yang hanya menekankan identitas iman tanpa refleksi sosial berisiko membentuk peserta didik dengan cara pandang eksklusif dan defensif terhadap perbedaan. Sebaliknya, kurikulum PAK multikultural yang berakar pada mandat budaya menempatkan iman Kristen dalam dialog kritis dengan realitas pluralisme tanpa mengorbankan partikularitas teologisnya. Triposa & Kolibu menekankan bahwa pendidikan Kristen di Indonesia harus mampu mengintegrasikan nilai budaya lokal dan pluralitas agama sebagai bagian dari ekspresi iman yang terbuka dan bertanggung jawab.⁴⁴ Pandangan ini sejalan dengan Volf (2011) yang menggarisbawahi pentingnya “identitas terbuka” dalam iman Kristen yaitu sikap yang tetap berakar pada kebenaran Injil tetapi bersedia merangkul dan berdialog dengan “yang lain”.⁴⁵

Selain itu, kerangka konseptual kurikulum PAK multikultural perlu menyadari bahwa pendidikan selalu berlangsung dalam konteks relasi kuasa. Kurikulum dapat berfungsi sebagai alat reproduksi ideologi dominan atau sebagai sarana transformasi sosial. Apple mengingatkan bahwa kurikulum harus dilihat sebagai medan ideologis tempat nilai-nilai dan kepentingan sosial dipertarungkan.⁴⁶ Oleh karena itu, pengembangan kurikulum PAK multikultural harus bersifat reflektif terhadap konteks sosial-politik Indonesia, di mana agama sering kali berkelindan dengan identitas mayoritas-minoritas dan kepentingan politik. Kesadaran ini penting agar kurikulum tidak secara tidak sadar melanggengkan ketimpangan dan eksklusivisme.

⁴¹ James A. Banks, *Transforming Multicultural Education Policy and Practice*.

⁴² Netti Lorensia and Br Turnip, “Analysis of Multiculturalism Learning in Christian Religious Education in Fostering Religious Tolerance” 1, no. 1 (2025).

⁴³ Eka Ariya Mutiara et al., “Dinamika Kebijakan Pendidikan Multikultural Dalam Konteks Sekolah Dasar Kristen Mendorong Toleransi Beragama Dan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 3040–3047.

⁴⁴ Dirk Roy Kolibu, “Reconceptualization of Education in Plural Society : Embracing Cultural Diversity in Christian Teaching in Indonesia,” *Journal of Education and Learning Technology (JELT)* 5, no. 7 (2024): 221–228.

⁴⁵ Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*.

⁴⁶ M. W. Apple, *Ideology and Curriculum* (5th Ed.). (Routledge., 2019).

Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, kerangka konseptual ini menempatkan gereja dan lembaga pendidikan Kristen sebagai agen formasi iman publik yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Pendidikan agama tidak hanya bertujuan membentuk kesalehan personal, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan teologis dan etis untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam masyarakat plural. Forrester (2011) menekankan bahwa teologi publik menuntut keterlibatan iman dalam ruang publik yang majemuk, sehingga pendidikan teologis perlu membuka ruang dialog lintas iman dan budaya untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkelanjutan.⁴⁷

Dengan demikian, kerangka konseptual pengembangan kurikulum PAK multikultural yang ditawarkan dalam uraian ini tidak dimaksudkan sebagai model teknis atau desain operasional yang siap pakai, melainkan sebagai peta konseptual reflektif yang memandu perumusan dan evaluasi kurikulum secara kontekstual. Kebaruan kerangka ini terletak pada integrasi eksplisit antara tafsir teologis-kritis mandat budaya Kejadian 1:28 dan prinsip pendidikan multikultural dalam satu bangunan konseptual yang koheren. Integrasi ini memungkinkan pendidikan agama Kristen dikembangkan secara lebih reflektif, kritis, dan relevan dengan tantangan pluralisme budaya dan agama di Indonesia. Seperti ditegaskan Sihombing et al., pendidikan Kristen yang multikultural harus mampu mengintegrasikan nilai iman dan toleransi melalui dialog pedagogis yang membentuk identitas iman yang terbuka terhadap keberagaman.⁴⁸

Kerangka ini juga membuka ruang bagi penelitian dan inovasi kurikulum lanjutan di berbagai jenjang pendidikan. Dengan menempatkan mandat budaya sebagai fondasi teologis, pendidikan multikultural tidak lagi dipandang sekadar pendekatan pedagogis umum, tetapi sebagai bagian integral dari praksis iman Kristen yang bertanggung jawab di tengah dunia yang plural.

IV. KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa mandat budaya dalam Kejadian 1:28, ketika ditafsirkan secara teologis-kritis, tidak dapat direduksi sebagai legitimasi dominasi manusia atas ciptaan maupun sebagai dasar pembenaran relasi kuasa yang timpang dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, mandat budaya perlu dipahami dalam kerangka teologi penciptaan yang etis dan relasional, yang menempatkan manusia sebagai mitra Allah dalam memelihara kehidupan, membangun keadilan, dan mengelola relasi secara bertanggung jawab dengan alam serta sesama manusia. Penafsiran ini menggeser paradigma antroposentris menuju pemahaman mandat budaya sebagai panggilan moral yang mencakup dimensi ekologis sekaligus sosial.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan plural secara budaya serta agama, mandat budaya memiliki implikasi sosial yang signifikan. Relasi antarmanusia dalam masyarakat majemuk tidak dapat diasumsikan berlangsung secara harmonis, melainkan sarat dengan dinamika identitas, sejarah konflik, dan relasi kuasa. Oleh karena itu, mandat budaya memberikan dasar teologis bagi keterlibatan aktif umat Kristen dalam

⁴⁷ Forrester, *Public Theology for the 21st Century*.

⁴⁸ Jefferson Sihombing, Ongky Sakoikoi, and Eko Saputra Salamanang, "Integrating Christian Values in Multicultural Classrooms : A Study of Religious Tolerance and Faith Identity," *ISAR Journal of Multidisciplinary Research and Studies* 4 (2023): 70–74.

Desire KaroKaro, dkk: MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

membangun relasi sosial yang adil, inklusif, dan dialogis. Pemahaman ini menegaskan bahwa pluralisme bukan sekadar realitas sosial, tetapi medan etis tempat iman Kristen diwujudkan secara bertanggung jawab.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Kristen (PAK) multikultural selama ini masih cenderung dikembangkan secara normatif dan pedagogis, dengan penekanan pada toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan tanpa integrasi refleksi teologis yang mendalam. Pendekatan semacam ini berisiko jatuh pada moralistik dangkal dan gagal menjawab ketegangan antara partikularitas iman Kristen dan realitas pluralisme. Oleh karena itu, PAK multikultural perlu direorientasi sebagai praksis teologis yang reflektif dan kritis, yang secara sadar mengelola relasi iman dengan konteks sosial multikultural.

Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini menawarkan kerangka konseptual pengembangan kurikulum PAK multikultural yang berakar pada tafsir teologis-kritis mandat budaya Kejadian 1:28. Kerangka ini menempatkan mandat budaya sebagai fondasi teologis, mengintegrasikannya dengan orientasi pedagogis reflektif-kritis, serta mengarahkannya pada pembentukan peserta didik yang mampu menghidupi iman Kristen secara dialogis, adil, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat plural. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi teologis-kurikuler yang menjadikan mandat budaya bukan hanya sebagai dasar etika umum, tetapi sebagai kerangka konseptual yang memandu pengembangan kurikulum PAK multikultural secara koheren dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana teologi pendidikan Kristen dengan menawarkan landasan konseptual bagi pengembangan kurikulum PAK yang lebih reflektif, kritis, dan relevan dengan tantangan pluralisme budaya dan agama di Indonesia. Kerangka yang ditawarkan juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan, baik dalam bentuk pengembangan model kurikulum operasional maupun studi empiris mengenai implementasi PAK multikultural berbasis mandat budaya di berbagai konteks pendidikan Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. W. *Ideology and Curriculum (5th Ed.)*. Routledge., 2019.
- Arifianto, Yonatan Alex, Andreas Fernando, Reni Triposa, Sekolah Tinggi, Teologi Sangkakala, Kata Kunci Pluralisme, Multikultural Agama, and Pendidikan Agama. "SOSIOLOGI PLURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UPAYA MEMBANGUN KESATUAN BANGSA." *Jurnal Shanan* 2, no. 2 (2021): 95–110.
- Beragama, Kerukunan Hidup. "Volume 26 Nomor 2 September 2015 431" 26, no. September (2015): 431–443.
- Beukes, Johann. "Neoplatonism in the Cologne Tradition of the Later Middle Ages : Berthold of Moosburg (ca . 1300 – 1361) as Case Study" (2020): 1–15.
- Chijioke, Agoha Emmanuel, and Festus Chukwunyere. "DOMINION OR DESTRUCTION ? A THEOLOGICAL AND HERMENEUTICAL CRITIQUE OF HUMAN AUTHORITY OVER NATURE IN GENESIS 1 : 26 – 28 : IMPLICATIONS FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY" (2025): 15–32.
- Cholil, S. "Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy." *Interreligious studies and intercultural theology* 6, no. 2 (2023): 196–204. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57618/1/Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57618/1/Freedom%20of%20Religion%20amid%20Polarization%20and%20Religious%20Moderation%20Policy.pdf).

Desire KaroKaro, dkk: MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

- Conradie, Ernst M. "THE FOUR TASKS OF CHRISTIAN ECOTHEOLOGY : REVISITING THE CURRENT DEBATE" 119, no. 1967 (2021): 1–13.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th Ed. Thousand Oaks, CA: : SAGE Publications, 2018.
- David G. Horrell, Cheryl Hunt, and Christopher Southgate. "Appeals to the Bible in Ecotheology and Environmental Ethics: A Typology of Hermeneutical Stances." *Sage Jurnal: Studies in Christian Ethics* 21, no. 2 (2008).
- Forrester, D. B. *Public Theology for the 21st Century*. Routledge., 2011.
- Hapsarini, Roidja, and Yendi Wati Pige. "Pemahaman Peserta Didik Tentang Mandat Budaya Dalam Kejadian 1 : 28 Terhadap Kepedulian Lingkungan" 1 (2021): 39–49.
- Jakaria, Yaya, and Pusat Penelitian Kebijakan. "PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR DENGAN MATA PELAJARAN YANG DIAMPU ANALYSIS OF APPROPRIATENESS AND SUITABILITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ' EDUCATIONAL BACKGROUND AND THEIR TAUGHT-SUBJECT-MATTER" (2014): 499–514.
- James A. Banks, Margaret Smith Crocco. *Transforming Multicultural Education Policy and Practice*. Colombia: Teachers College Press, 2021.
- Kolibu, Dirk Roy. "Reconceptualization of Education in Plural Society : Embracing Cultural Diversity in Christian Teaching in Indonesia." *Journal of Education and Learning Technology (JELT)* 5, no. 7 (2024): 221–228.
- Lorensia, Netti, and Br Turnip. "Analysis of Multiculturalism Learning in Christian Religious Education in Fostering Religious Tolerance" 1, no. 1 (2025).
- Marheni, Wita, Patricia Wira, Lestari Samuel, and Linggi Topayung. "Pendidikan Agama Kristen : Menyemai Kasih Dan Kerukunan Dalam Komunitas Yang Multikultural." *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* 3, no. 1 (2025): 17–23.
- Middleton, By J Richard. "The Liberating Image ? Interpreting the Imago Dei in Context" 1 (1994): 8–25.
- Mutiara, Eka Ariya, Afridha Laily Alindra, Kana Febriani, and Rahmah Nafiisah. "Dinamika Kebijakan Pendidikan Multikultural Dalam Konteks Sekolah Dasar Kristen Mendorong Toleransi Beragama Dan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 3040–3047.
- Nuhamara, Daniel. "Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen." *Jurnal Jaffray* 16, no. 1 (2018): 93.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*. 7th ed. Pearson, 2018. <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/curriculum-foundations-principles-and-issues/P200000006450>.
- . *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*. (8th ed.). Pearson, 2018.
- Osmer, Richard R. *Practical Theology: An Introduction*. Eerdmans Publishing. Eerdmans Publishing, 2008.
- Report, Human Development. "Human Development Report 2012/2013. Sustainable Nation." *Latvijas Univeritate* (2013).
- Rezeki Putra Gulo, Erwin Zai, Agusmawarni Harefa. "Pendidikan Agama Kristen Dalam Masyarakat Majemuk: Mencerminkan Hidup Humanis Di Tengah-Tengah Pluralisme." *ELEOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 2 (2023): 81–90.
- Roebben, Bert, and Klaus von Stosch. "Religious Education and Comparative Theology: Creating Common Ground for Intercultural Encounters." *Religions* 13, no. 11 (2022): 1014. <https://www.mdpi.com/2077-1444/13/11/1014/pdf?version=1666770007>.
- Roedy Silitonga and Yosia Belo. "Imago Dei as the Foundation of Christian Ethics in Addressing the Ecological Crisis in Indonesia." *Verbum Et Ecclesia* (2025): 1–6.
- Scott, Hilton R. "Worship in a Post-Lockdown Context : A Ritual-Liturgical Perspective"

Desire KaroKaro, dkk: MANDAT BUDAYA KEJADIAN 1:28 DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS-KRITIS BAGI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN MULTIKULTURAL

(n.d.): 1–8.

Siahaan, Wilson Afandi, and Ponten Naibaho. “Beragama Menciptakan Harmoni Sosial : Refleksi Teologis Atas Tanggung Jawab Iman Di Tengah Keberagaman,” no. 1 (2026): 1–12.

Sihombing, Jefferson, Ongky Sakoikoi, and Eko Saputra Salamanang. “Integrating Christian Values in Multicultural Classrooms : A Study of Religious Tolerance and Faith Identity.” *ISAR Journal of Multidisciplinary Research and Studies* 4 (2023): 70–74.

Ste, Małgorzata. “Education . Towards Personal Growth and Positive Mental” (2021).

Volf, Miroslav. *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Nashville: Abingdon Press, 2019.

Wright, C. J. H. *The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative*. IVP Academic., 2006.

Wrogemann, Henning. “Intercultural Theology as In-Between Theology” (2021).

Živkovi, Predrag, and Vladimir Bakraˆ. “Adventists in Montenegro — From the Atheistic Psychosis of Socialism to the Post-Socialist Individuation of Adventism” (2020).